BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)

Pertama kali didirikannya BPP pada tanun 1977 yang dibina oleh Bimas di tingkat kabupaten dan koordinasi dengan lingkup Departemen Pertanian. Selama kelembagaan penyuluhan pertanian terjadi perkembangan paradigma yakni pra otonomi daerah (Otda) dan sesudah Otda.Sebelum adanya kebijakan Otda, penyuluhan pertanian bersifat desentralisasi, yakni setiap kebijakan yang diterapkan berdasarkan atas introduksi dari pusat (*Top Down*). Sebelum otonomi daerah ini, lembaga penyuluhan pertanin selalu terintervensi oleh pemerintah, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh lembaga penyuluhan pertanian yang selalu berada dalam pengaruh kekuasaan Negara yang cukup besar sehingga menyulitkan penyuluh untuk menerapkan prinsip sistem kerja secara baik. Sebaliknya penyelenggaraan penyuluhan pertanian setelah otonomi daerah lebih bersifat *bottom up*, yakni penyuluhan berdasarkan atas kebutuhan petani di lapangan.

1. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Setiap Tingkat

   Departemen Pertanian (2002), kelembagaan penyuluhan pertanian disetiap tingkat daerah sebagai berikut:

a. Tingkat Provinsi

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom sebagaimana tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999, pasal 9, mencakup bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten atau kota serta bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan provinsi yang terkait dengan bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian tercantum dalam PP No. 25 Tahun 2000 Pasal 3 Ayat 5, yakni kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian sumber daya manusia aparat pertanian teknis funsional, keterampilan dan diklat kejuruan.

Berdasarkan kewenangan diatas, pemerintah provinsi memiliki peranan penting dalam (1) menyelenggarakan diklat penyuluhan pertnian dan agribisnis untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian, (2) memfasilitasi kerja sama dengan pengembangan jaringan informasi lintas kabupaten atau kota. (3) memfasilitasi terselenggaranya forum-forum pertemuan petani atau kelompok lintas kabupaten atau kota.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi adalah Balai Diklat Pertanian/Agribisnis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh komisi penyuluhan pertanian yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur. Anggota komisi penyuluhan pertanian provinsi terdiri dari 60 % unsur non pemerintah dan 40 % unsur pemerintah.

b. Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 ayat 2, kewenangan di bidang pertanian wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan tidak dapat dilimpahkan kepada provinsi. Kewenangan uang dimiliki oleh kabupaten/kota lebih banyak bersifat pelaksanaan.

Kewenangan kabupaten dibidang Penyuluhan Pertanian, sesuai dengan Keprs No. 5 Tahun 2001 tentang pelaksanaan pengukuhan kewenangan kabupaten/kota dan keputusan Mendagri No. 130-67 tahun 2002 tanggal 20 Februari tentang pengukuhan kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluan dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
3. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan lembaga ekonomi petani.
4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh pertaninan, peneliti, dan LSM.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluhan pertanian.
6. Pembinaan dan pengolaan lembaga penyuluhan pertanian.
7. Pembinaan kepemimpinan petani wanita tani dan pemuda tani.
8. Pengelolaan perpustakaan pertanian.

9. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.

Kelembagaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ditingkat kabupaten/kota adalah unit-unit kerja baik yang berstatus badan/kantor/balai/UPTD Penyuluhan Pertanian maupun berstatus Sub Dinas/Bagian atau seksi yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah dan ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya unit-unit kerja ini dibantu oleh komisi penyuluhan pertanian kabupaten/kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaannya komisi penyuluhan pertanian provinsi dari 60 % unsur non pemerintah dan 40% unsur pemerintah.

c. Tingkat Kecamatan

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian ditingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau lembaga lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Balai Penyuluhan Pertanian dibentuk dengan memperhatikan:

1. Tersedianya fasilitas untuk tersusunnya program penyuluhan pertanian yang tertib.
2. Tersedianya fasilitas penyebaran informasi, teknologi dan pasar.
3. Terselanggaranya kerjasama antar peneliti pertanian, penyuluhan pertanian, dan kontak tani.

4. Tersedianya fasilitas untuk kegiatan belajar dan forum-forum pertemuan petani.
5. Tersedianya fasilitas untuk percontohan tani dan kemitraan agribisnis.

d. Tingkat Desa

Kelompok penyuluhan pertanian ditingkat desa adalah kelompok tani. Kelompok tani tersebut melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai mitra kerja penyuluhan pertanian.

3.1.2 Tentang Balai Penyuluhan Pertanian

Balai penyuluhan merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas untuk menyebarkan informasi dan mendidik tentang pertanian. Tujuan agar mereka mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki atau meningkatkan usaha taninya dan selanjutnya pendapatan dan kesejahteraannya sendiri serta masyarakatnya.

(Affandi, 1977: 13)

Penyuluhan merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Penyuluhan dengan demikian merupakan suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal atau suatu sistem pendidikan diluar sistem persekolahan yang biasa, dimana orang ditunjukkan cara-cara mencapai sesuatu dengan memuaskan sambil orang itu tetap mengerjakannya sendiri, jadi belajar dengan mengerjakan sendiri.

Metode penyuluhan menurut hubungan penyuluhan dan sasarannya berdasarkan hubungan penyuluhan kesasarannya, metode penyuluhan dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

a. Komunikasi langsung, baik melalui percakapan tatap muka atau lewat media tertentu (telepon, faksimili) yang memungkinkan penyuluhan dapat berkomunikasi secara langsung (memperoleh respons) dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat.
b. Komunikasi tak langsung, baik lewat perantara orang lain, lewat surat atau media yang lain yang tidak memungkinkan penyuluh dapat menerima respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat (Mardikanto, 1994).

Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa penyuluhan baik Penyuluhan Pertanian Spesialis (PPS) maupun Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) belum mendapatkan informasi hasil penelitian yang mereka perlukan secara kesinambungan. PPS yang sebagian dari tugasnya diharuskan untuk melatih PPL secara teratur merasakan kurangnya informasi hasil penelitian untuk mendukung kegiatan itu yang akhirnya berlanjut kepada kurang efektifnya latihan dan kunjungan PPL ke petani. Penelitian sering pula dinilai kurang efektif karena tidak langsung berkaitan dengan masalah lapangan yang dihadapi oleh petani dan penyuluh. Peneliti kurang menerima umpan balik yang mereka perlukan untuk menyusun program penelitian, kondisi ini secara jelas memperlihatkan belum memadainya keterkaitan antara penelitian dan penyuluhan.

Didalam kenyataannya, kualifikasi penyuluhan tidak cukup hanya dengan memenuhi persyaratan keterampilan sikap dan pengetahuan saja, tetapi keadaan atau latar belakang sosial budaya, bahasa, agama, kebiasaan-kebiasaan. Seringkali justru lebih banyak menentukan keberhasilan penyuluhan yang dilakukan. Karena itu penyuluhan yang baik, sejauh mungkin harus memiliki latar belakang sosial budaya yang sesuai dengan keadaan seorang penyuluh akan bertugas di wilayah kerja yang memiliki kesenjangan sosial budaya yang telah dimilikinya (Mardikanto, 1994).

Ragam materi yang perlu disiapkan dalam setiap kegiatan penyuluhan mencakup :

1. Kebijakan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pertanian (baik dari tingkat pusat maupun sampai di tingkat lokalitis), seperti pola kebijakan umum pembangunan pertanian, kebijakan harga dasar atau penyaluran kredit.
2. Hasil-hasil penelitian atau pengujian dan rekomendasi teknis yang dikeluarkan untuk instansi yang berwenang.
3. Pengalaman petani yang telah berhasil.
4. Informasi pasar seperti harga barang, penawaran dan permintaan (Mardikanto, 1994).

Dalam bahasa Belanda digunakan kata "*voorlichting*" yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Istilah ini digunakan pada masa kolonial bagi negara-negara jajahan Belanda, walaupun sebenarnya penyuluhan diperlukan oleh kedua pihak. Indonesia

misalnya, mengikuti cara Belanda menggunakan kata penyuluhan, sedangkan Malaysia yang dipengaruhi bahasa Inggris menggunakan kata perkembangan. Bahasa Inggris dan Jerman masing-masing mengistilahkan sebagai pemberian saran atau beratung yang berarti seorang pakar dapat memberikan petunjuk kepada seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya. Kegiatan penyuluhan sebenarnya bukanlah sekedar penyampaian informasi dan menerangkan segala sesuatu yang perlu kita terangkan kepada masyarakat, akan tetapi penyuluhan bertujuan agar masyarakat benar-benar memahami, menghayati dan atas kesadarannya sendiri mau menerima, menerapkan dan melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, dan masyarakatnya serta kemajuan bangsa dan negara. Dapat dikatakan, penyuluhan bukanlah kegiatan pengubahan perilaku melalui pemaksaan atau ancaman-ancaman, tetapi penyuluhan adalah upaya pengubahan perilaku melalui proses pendidikan, sehingga kegiatan penyuluhan sungguh tidak gampang, tetapi memerlukan ketekunan, kesabaran, menuntut banyak waktu, tenaga, biaya dan merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan.

Pada unit yang paling kecil di daerah pedesaan, pendekatan berdasarkan kelembagaan dalam proses adopsi inovasi adalah melalui lembaga yang disebut dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Di BPP ini ada sejumlah penyuluh pertanian, mereka merencanakan dan membuat programa penyuluhan, kemudian dituangkan dalam praktek, misalnya melalui Demonstrasi Plot (Demoplot), Demonstrasi Farm (Demfarm), Demonstrasi

Area (Demarea), atau melalui cara lain. Selanjutnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan pembantu-pembantunya ditingkat desa, yaitu para kelompok tani, maka informasi tersebut diteruskan kepara petani, apakah melalui cara kunjungan, rapat atau lainnya (Soekartawi, 1992).

Dalam prakteknya penempatan penyuluh dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Penyuluh lapangan yaitu seorang penyuluh ditempatkan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).
2. Penyuluh tingkat kecamatan yang ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
3. Penyuluh tingkat kabupaten yang ditempatkan di Dinas Lingkup Pertanian Dati II.
4. Penyuluh tingkat provinsi yang ditempatkan di Dinas Lingkup Pertanian Dati I maupun Balai Informasi Pertanian.
5. Penyuluh tingkat nasional yang ditempatkan di Badan Pengendalian Bimas (Suhardiyono, 1992).

Salah satu unsur utama yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat adalah lemahnya komunikasi antara penyuluh dengan masyarakatnya, karena kurang adanya kontak pribadi yang disebabkan oleh :

1. Bentuk komunikasi yang paling efektif adalah tatap muka.
2. Kebutuhan serta kemampuan masyarakat bawah umumnya bersifat situasional dan bersifat individual (orang per orang).

3. Semua kegiatan dan bantuan, cenderung diawasi oleh pemerintah atau penyedia sumber dana yang sering membatasi ruang gerak dan kelincahan penyuluh (Mardikanto, 1991).

Sistem penyuluhan akan sangat tidak efektif bila terdapat kekurangan-kekurangan teknis seperti kurangnya informasi, dan teknologi yang memadai yang bisa disampaikan ke petani. Selain itu adanya kekurangan staf dan model penyuluhan menyangkut penyebaran informasi dan teknik penyampaian adalah contoh dari faktor penghambat kelancaran penyuluhan (Bayer et al, 1999).[1]

3.1.3 Peranan kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Dengan beragamnya kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah, maka peranannya akan berbeda tergantung pada bentuk/strukturnya. Oleh karena itu, berdasarkan peta kewenangan yang diatur oleh UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25tahun 1999, peranan kelembagaan penyuluhan pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/kota
    1. Merumuskan kebijaksanaan operasional untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP.
    2. Menyusun tata hubungan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti, dan pengusaha agribisnis.
    3. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian di BPP.

[1]http://azisturindra.wordpress.com/2009/12/02/pengertian-penyuluhan-pertanian/(Kamis, 6 Maret 2014 Pukul 10:30)

4. Memfasilitasi kerjsama antar BPP dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
5. Mendorong swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
6. Mendorong tumbuhnya penyuluhan pertanian swakarsa dan pusat-pusat pelatihan swadaya.
7. Melakukan kaji terap dan mengembangkan teknologi lokal spesifik.
8. Melakukan koordinasi, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh BPP serta mengatur alokasi dan distribusi sumberdaya penyuluhan pertanian.
9. Memberikan dukungan pelayanan informasi melalui lembaga informasi pertanian dan pengembangan jaringan informasi antar BPP.
10. Membantu penyuluhan pertanian untuk menyiapkan materi penyuluhan pertanian.
11. Memfasiltasi pendidikan dan pelatihan penyuluhan pertanian secara berkala.
12. Mengembangkan sarana dan prasarana serta penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
13. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial ekonomi petani.
14. Memberikan umpan balik ke provinsi dan pemerintah pusat.

b. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

1. Memfasilitasi kelompok tani dan kelompok pelaku agribisnis lainnya dalam menyusun program penyuluhan pertanian untuk mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis sesuai dengan kebutuhannya atau masalah yang dihadapinya.
2. Melaksanakan penyuluhan pertanian dalam membangun sistem dan usaha agribisnis dengan melakukan pertemuan berkala mingguan ke kelompok tani atau kelompok pelaku agribisnis lainnya.
3. Memfasilitasi berbagai kegiatan petani dan pelaku agribisnis lainnya misalnya seperti seminar, pertemuan teknis, temu lapag dan musyawarah.
4. Memfasilitasi pengembangan organisasi petani dan pelaku agribisnis misalnya seperti paguyuban, jaringan petani,dan pelaku agribisnis lainnya.
5. Memfasilitasi pengembangan kepemimpinan petani dan pelaku agribisnis lainnya.
6. Memfasilitasi pengembangan media yang dibuat oleh petani dan pelaku agribisnis lainnya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi diantara mereka.
7. Melakukan kerjasama kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
8. Melaksanakan diklat bagi penyuluhan pertanian secara berkala.

9. Bersama peneliti memfasilitasi riset aksi yang dilakukan oleh petani dan pelaku bisnis lainnya.
10. Mengakses informasi dan teknologi yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian.
11. Menyediakan dana, sarana dan prasaran yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan pertanian.
12. Mengusahakan adanya insentif bagi penyuluhan pertanian di BPP.
13. Memberikan umpan balik tentang pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP ke kabupaten/kota.

Gambar 3.1

Logo Balai Penyuluhan Pertanian



Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian dapat dilakukan secara langsung kepada perorangan tani atau melalui kontak tani (pendekatan individu), dapat pula diselenggarakan langsung kepada masyarakat atau kelompok tani. Proses kegiatan penyuluhan dilihat dari sudut petani yang menerima apa yang disuluhkan, pada umumnya melalui 4 tahap yaitu :

a. Mendengar, dari penyuluh atau dari siaran pedesaan.
b. Melihat, dari kebun percontohan, petak-petak demontrasi, siaran-siaran dan sebagainya.
c. Diskusi atau musyawarah
d. Bergerak mengerjakan atas pertimbangannya sendiri menurut apa yang di dengar, dilihat dan dibicarakan.

Media penyuluhan yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan pertanian diantaranya seperti:

a. siaran-siaran tercetak seperti brosur/selebaran, leaflet, majalah, poster, foto, slide dan sebagainya.
b. Radio (siaran untuk di dengar)
c. Televisi (siaran untuk didengar dan dilihat)
d. Surat kabar (siaran untuk dibaca dan dilihat)
e. Mobile unit dan perlengkapan audio visual (proyektor, film, slide dan sebagainya)

3.1.4 Dibentuknya Kelompok Tani

Mokhzani (Wong, 1979) dalam Mardikanto (1993) mengemukakan adanya asumsi tentang kecendrungan alami dari masyarakat petani untuk menuju ke arah kegiatan kerjasama (*coorperation*). Dalam hubungan ini, Geleksi (Wong, 1979) dalam Mardikanto (1993) mengemukakan perlunya dibentuk kelompok tani "baru" untuk dapat menaikan kemakmuran masyarakat petani melalui kenaikan produktivitas serta distribusi pendapatan yang lebih merata.

Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani itu, antara lain diungkapkan oleh Torres (Wong, 1979) dalam Mardikanto (1993), sebagai berikut:

a. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok.
b. Semakin terarahnya peningkatan secara tepat tentang jiwa kerjasama antar petani.
c. Semakin cepatnya proses prembesan penerapan inovasi teknologi terbaru.
d. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang (pinjaman) petani.
e. Semakin meningkatkan orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) maupun produksi yang dihasilkan.
f. Semakin dapat membantu efesiensi pembagian air irigasi serta pengawawsannya oleh petani sendiri.

3.1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasai Balai Penyuluhan Pertanian yaitu untuk diberi tanggung jawab mengenai wewenang apa saja tugas yang akan di jalankan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Balai Penyuluhan Pertanian.

1. Kepala/Kordinator PP-BPP

   Nasikin, A.Md

2. Sekretaris BPP

   Momon Sutarman

3. PP Wilbin Babakan Jaya

   Munifah, A.Mda

4. PP Wilbin Rancahan

   Adi Cahyadi

5. PP Wilbin Druntenkulon

   Saepudin

6. PP Wilbin Sekarmulya/Kedungdawa

   Darsono

7. PP Wilbin Druntenkulon

   Arman

8. PP Wilbin Gabuswetan

   Wahyudi

9. PP Wilbin Kedungdawa

   Sudirno

10. PP Wilbin Rancamulya

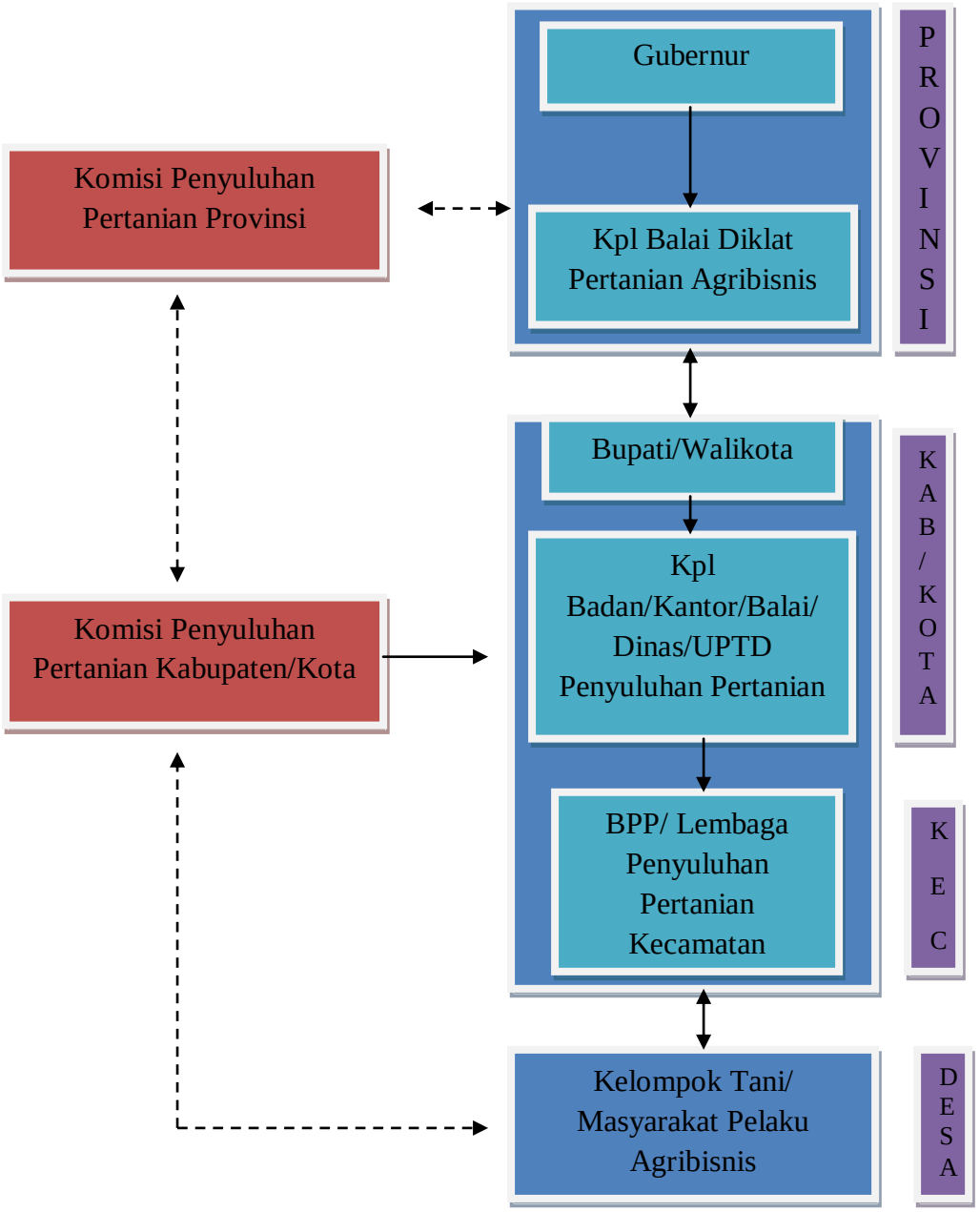
    Warti'ah

Balai Penyuluhan Pertanian dengan hubungan kelembagaan yang terjalin antara komisi penyuluhan pertanian provinsi dan komisi penyuluhan pertanian kabupaten/kota saling terhubung satu sama lain, di tingkat provinsi yaitu dikepalai oleh Gubernur dengan di bawah pimpinannya ialah kepala Balai Diklat Pertanian Agribisnis, di tingkat Kabupaten atau Kota adanya Bupati/Walikota di bantu oleh Kepala Badan/Kantor/Balai/Dinas/UPTD Penyuluhan Pertanian sampai di tingkat Kecamatan yaitu BPP/Lembaga

Penyuluahan Pertanian Kecamatan selanjutnya kelembagaan langsung kepada desa yaitu Kelompok tani/masyarakat pelaku agribisnis.

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Hubungan kelembagaan



Sumber :Arsip Balai Penyuluhan Pertanian, 2014

3.2 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, peneliti memaparkan mengenai desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, dan teknik analisa data yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2.1 Desain Penelitian

Pada desain penelitian ini, peneliti melakukan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana untuk mengetahui dan mengamati segala hal secara ilmiah.

Menurut David Williams (1995) dalam buku Lexy Moleong menyatakan:

> "Bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah"(Moleong, 2007:5)

Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam buku Lexy Moleong, menyatakan bahwa:

> "Bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada"(Moleong, 2007:5)

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam suatu keadaan atau kondisi tertentu.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan.

Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Metode deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi, yakni:

> "Metode *deskriptif*, yaitu dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat". (Rakhmat, 2002:22).

Menurut buku *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif* karangan **Dr. Elvinaro Ardianto** mencirikan metode kualitatif deskriptif sebagai berikut :

> "Metode kualitatif deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*). Peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat. Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Ia tidak berusaha untuk memanipulasi variabel." (Ardianto, 2011:60)

Metode penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena, dan gejala. Metode penelitian

kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Dalam penelitian ini peneliti memiliki paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivis atau paradigma transmisi.

Paradigma Konstruktivis menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dengan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek (komunikan/decoder) sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosial.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk dapat menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.2.2.1 Studi Pustaka

Memahami apa yang di teliti, maka upaya untuk menjadikan penelitian tersebut baik. Perlu adanya materi-materi yang diperoleh dari pustaka-pustaka lainnya.

Menurut dari J. Supranto dalam bukunya Rosadi Ruslan, mengemukakan :

> "Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia diperpustakaan" (Ruslan, 2003:31)

Peneliti disini dalam melakukan penelitian tentu tidak terlepas dari adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan. Disini peneliti menggunakan studi pustaka dengan mencari berbagai data sebagai pendukung dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan:

1. **Referensi Buku**

   Referensi buku adalah buku yang dapat memberikan keterangan topik perkataan, tempat pariwisata, data statistika, pedoman, alamat, nama orang, riwayat orang-orang terkenal. Pelayanan referensi adalah pelayanan dalam menggunakan buku-buku referensi dan disebut "koleksi referensi", sedangkan

ruang tempat penyimpanan disebut ruang referensi karena sifatnya dapat memberikan petunjuk harus selalu tersedia di perpustakaan sehingga dapat dipakai oleh setiap orang pada setiap saat.

2. **Skripsi Peneliti Terdahulu**

   Disini peneliti menggunakan studi pustaka dengan melihat hasil karya ilmiah para peneliti terdahulu. Peneliti mengangkat penelitian ini tentang pola komunikasi, untuk mendapatkan referensi, peneliti melihat penelitian skripsi sebelumnya yang dijadikan sebagai sumber pembuatan skripsi yang berkaitan dengan pola komunikasi.

3. **Internet *Searching* (Pencarian Data Secara *Online*)**

   Pada penelitian apapun bisa juga dalam pengumpulan data dilakukan secara *online* atau media internet dengan mencari dan mengumpulkan informasi-informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Adapun studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang *valid* dan faktual yang diharapkan berkenaan dengan penelitian yang dilakukan mencakup beberapa cara diantaranya:

1. Wawancara

Dalam penelitian perlu adanya data-data yang relevan untuk dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian yang berlangsung, salah satunya adalah melalui wawancara.

Menurut Berger (2000:11) dalam buku Rachmat Kriyantoro, menyatakan:

> "wawancara adalah percakapan antara periset-seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan-seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi paling penting tentang suatu objek."

Adapun beberapa macam *Interview* atau wawancara yang dikemukan oleh **Esterberg** (2002), yaitu:

1. Wawancara Terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.
2. Wawancara Semiterstruktur, ini termasuuk kategori *in-deptinterview*, tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
3. Wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Sugiyono, 2012:73-74)

Maka, dalam hal ini peneliti pun mengumpulkan data-data dengan salah satu caranya melalui wawancara untuk mendapatkan informasi yang benar-benar relevan dari narasumber terkait dalam hal ini dilakukan kepada Balai

Penyuluhan Pertaniandan kelompok tani yang terpilih sebagai informan dan beberapa dari lapisan seseorang yang mengerti pertanian sebagai informan kunci, dengan itu semua mengetahui kebenaran dan menjadikan keyakinan bagi peneliti.

2. Observasi

Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatannya terhadap objeknya secara langsung, seksama dan sistematis.

Observasi ini memungkinkan untuk mengetahui, menganalisa tentang pola komunikasi Balai Penyuluhan Pertanian dalam penyebaran informasi pertanian.

3. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi.

Dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif menjelaskan tentang dokumentasi, sebagai berikut: “Dokumen merupakan catatan persitiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” (Sugiyono, 2012:82)

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

3.2.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya ("attribut"-nya) akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Dalam bukunya Suharsimi Arikunto (Manajemen Penelitian) Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.[2]

3.2.3.2 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Sebagaimana maksud yang disampaikan oleh **Sugiyono** dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah :

> "*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti." (Sugiyono, 2012:54)

[2]http://subliyanto.blogspot.com/2010/06/subyek-penelitian-dan-responden.html (tanggal 9 maret 2014 pkl. 23.02)

Adapun informan penelitian ini adalah anggota dari BPP dan kelompok tani yang berada di Desa Druntenwetan Kecamatan Gabuswetan, sebagaimana bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Pendidikan	Lama Bertani	Penggerak
1	Nasikin	57	D3	30 Tahun	Ketua BPP
2	Momon	44	SNAKMA	26 Tahun	Penyuluh BPP
3	Rohani	45	PGAN	23Tahun	Ketua Kelompok Tani
4	H.Siswo	50	SMA	25Tahun	Bendahara Kelompok Tani
5	Isomudin	36	SMA	10 tahun	Anggota Kelompok Tani

Sumber : Peneliti 2014

Kriteria di tetapkannya penentuan informan berdasarkan lamanya mereka bertani dan penggerak dengan pertimbangan peneliti akan mendapatkan jawaban yang berfariasi tentang fokus penelitian dari yang baru bertani atau pun yang sudah lama bertani. Selain itu peneliti menilai faktor pendidikan dan usia yang memberikan kedalaman berfariasinya data yang akan peneliti peroleh selama berada di lapangan.

3.2.3.3 Informan Pendukung

Untuk memperjelas dan memperkuat data yang lebih baik dalam informasi yang diperoleh. Terdapatnya informan pendukung yang dijadikan sebagai perjelas, adapun kriteria di tetapkannya

penentuann informan pendukung berdasarkan pekerjaan mereka yang dinilai mengetahui, mengamati dan berinteraksi secara langsung dengan Balai Penyuluhan Pertanian atau pun petani Desa Druntenwetan. Adapun informan terpilih sebagai berikut:

Tabel 3.3

Daftar Informan Pendukung

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	Siti Hajar	36	S1	Guru SMA
2	Damin	50	SD	RT/ Dagang

Sumber: Peneliti, 2014

3.2.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Definisi analisis data menurut Sugiyono dalam buku memahami penelitian kualitatif, antar lain :

> "Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

> kedalam pola, memilih nama penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain". (Sugiyono, 2005:89)

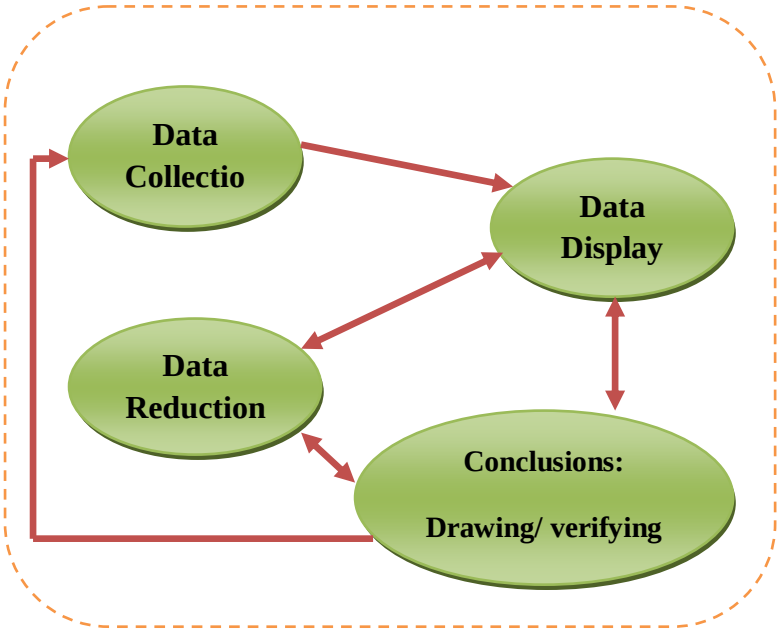
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

> **Milles and Huberman** (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. (Sugiyono, 2012:91)

Miles and Huberman melukiskan siklusnya seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3.2

Komponen-Komponen Analisa Data Model Kualitatif



Sumber: Buku "Memahami Penelitian Kualitatif" (Sugiono, 2012: 92)

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. **Reduksi Data** (*Data reduction*) : Kategorisasi dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah.
2. **Pengumpulan Data** (*Data collection*): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
3. **Penyajian Data** (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.
4. **Penarikan Kesimpulan (***Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
5. **Evaluasi** Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil

wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

Tahapan-tahapan analisis data di atas merupakan bagian yang tidak saling terpisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahap yang satu dengan tahap yang lain. Analisis dilakukan secara kontinyu dari awal sampai akhir penelitian, untuk mengetahui pola komunikasi Balai Penyuluhan Pertanian.

3.2.4.1 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapatnya data yang dapat dinyatakan valid atau berbeda saat ditemukan di lapangan dan dilaporkan oleh peneliti. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Sugiyono dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck.*(2005:270). Uji keabsahan data yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan, berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
2. *Triangulasi*, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. *Triangulasi* sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. *Triangulasi* teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. *Triangulasi* waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu situasi yang berbeda. (Sugiyono, 2005:270-274). Pada penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan jawaban yang disampaikan data dilakukan dengan cara

membandingkan jawaban yang disampaikan oleh informan utama dengan informan pendukung untuk mendapatkan data yang cocok dan sesuai.

3. Diskusi dengan teman sejawat, teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-*review* persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. (Moleong, 2007:334)

3.2.5 Lokasi dan Waktu Peneitian

Penelitian ini memiliki lokasi yang menjadi tempat penelitian bagi peneliti serta waktu berlangsungnya penelitian ini, adapun lokasi dan waktunya sebagai berikut:

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Balai Penyuluhan Pertanian, di Kecamatan Gabuswetan.Jl. Raya Saradan Gabuswetan Indramayu.

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan.Terhitung dari awal bulan Februari 2014 sampai bulan Juli 2014. Mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga ke penyelesaian dengan perincian waktu sebagai

Tabel 3.4

Jadwal Penelitain

No	Kegiatan	Bulan																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Penulisan Bab 1																												
	Bimbingan																												
3	Penulisan Bab II																												
	Bimbingan																												
4	Pengumpulan Data Lapangan																												
5	Penulisan Bab III																												
	Bimbingan																												
6	Seminar UP																												
7	Revisi UP																												
8	Wawancara Penelitian lapangan																												
9	Penulisan BAB IV																												
	Bimbingan																												
10	Penulisan BAB V																												
	Bimbingan																												
11	Penyusunan																												

	Keseluruhan Draft																														
12	Sidang Skripsi																														

Sumber : Peneliti 2014